



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH)
UNIT KERJA : BIDANG AUDIT INTERNAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MISBAH TAUFIQURROHMAN
2. Jabatan : DEPUTI
3. NHK : 59529

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.633.150.000**

1. Tanah Seluas 381 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/74 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/74 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
4. Tanah Seluas 350 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, Rp. 95.000.000
5. Tanah Seluas 350 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
6. Tanah Seluas 301 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 24.800.000
7. Tanah Seluas 243 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 60.750.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/180 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.550.000.000
9. Tanah Seluas 519 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 207.600.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 370.000.000**



1. MOTOR, YAMAHA FINO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000
2. MOTOR, VIAR Q1 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOBIL, CHERY TIGGO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
350.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 29.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 404.503.091

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.436.653.091

III. HUTANG Rp. 1.068.378.948

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.368.274.143

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.